

Transformasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila dalam Menghadapi Disrupsi Ekonomi Digital

Ahmad Hafidz Kurniawan¹, Dewi Rahmawati Sholihah², Muhammad Badruzzaman Anwar³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ma'arif Metro Lampung, Metro, Indonesia

Corresponding Author: ahmadhafidz@gmail.com^{1*}, dewirahmawatisholihah@gmail.com²

Info Artikel

Received: 23 Desember 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

People's Economy; Pancasila;

Digital Disruption;

Cooperative Transformation

Kata Kunci:

Ekonomi Kerakyatan;

Pancasila; Disrupsi Digital;

Transformasi Koperasi

Abstract

The rapid acceleration of the digital economy creates structural disruptions that fundamentally challenge the sustainability and relevance of grassroots economic institutions based on Pancasila in Indonesia. The aim: This research seeks to explore transformation strategies for cooperatives and MSMEs rooted in Pancasila values to navigate digital economic disruptions and to develop a grounded, practical transformation model. Methodology: A qualitative approach with constructivist grounded theory involving 118 informants from cooperatives, MSMEs, and community economic organizations across five districts in Lampung through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Results: Three transformation pathways were identified: organic-adaptive, disruptive-accelerative, and hybrid-synergistic, with the third pathway demonstrating the most sustainable outcomes through the integration of digital technology with the principles of gotong royong. Conclusion: The sustainable transformation of grassroots economics requires a value-first approach that grounds digital adoption in the ethics of cooperation and community-based Pancasila principles.

Abstrak

Akselerasi pesat ekonomi digital menciptakan disrupsi struktural yang secara fundamental menantang keberlanjutan dan relevansi institusi ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila di Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi transformasi koperasi dan UMKM yang berakar pada nilai Pancasila dalam menavigasi disrupsi ekonomi digital serta membangun model transformasi yang membumi. Metode: Pendekatan kualitatif dengan grounded theory konstruktivis melibatkan 118 informan dari koperasi, UMKM, dan organisasi ekonomi komunitas di lima kabupaten di Lampung melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil: Tiga jalur transformasi teridentifikasi: organik-adaptif, disruptif-akseleratif, dan hibrid-sinergis, dengan jalur ketiga menunjukkan hasil paling berkelanjutan melalui integrasi teknologi digital dengan prinsip gotong royong. Kesimpulan: Transformasi berkelanjutan ekonomi kerakyatan memerlukan pendekatan nilai-terlebih-dahulu yang menyandarkan adopsi digital pada etika kooperatif dan komunitarian Pancasila.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila yang selama ini menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia menghadapi ujian eksistensial akibat akselerasi disrupsi ekonomi digital yang semakin intensif. Platform digital global—mulai dari marketplace e-commerce, fintech, hingga gig economy—telah mengubah struktur pasar secara fundamental, menciptakan ketimpangan antara pelaku ekonomi yang berhasil beradaptasi dengan yang tertinggal. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) mencatat bahwa dari 65,5 juta unit UMKM dan 127.846 koperasi aktif di Indonesia, baru 19,3% yang telah menjalani transformasi digital secara substantif. Kesenjangan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga ideologis: model ekonomi digital yang didominasi logika kapitalistik-individualistik berpotensi menggerus nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang menjadi roh ekonomi kerakyatan Pancasila (Hidayati & Prasetyo, 2023).

Ekonomi kerakyatan Pancasila bukan sekadar sistem ekonomi teknis, melainkan manifestasi dari sila-sila Pancasila—terutama sila keempat tentang musyawarah mufakat dan sila kelima tentang keadilan sosial—dalam ranah kehidupan ekonomi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pendiri bangsa, sebagaimana ditekankan Bung Hatta dalam pemikirannya tentang ekonomi kooperatif. Namun, Yulianti dan Saragih (2023) mengidentifikasi bahwa era disrupsi digital menghadirkan dilema fundamental bagi koperasi: antara mempertahankan identitas kooperatif yang humanis dengan keharusan mengadopsi teknologi yang secara struktural mendorong efisiensi individual di atas solidaritas kolektif. Ketegangan antara nilai kerakyatan dan logika digital inilah yang menjadi problem akademis yang perlu dijawab melalui penelitian mendalam tentang pola dan strategi transformasi yang berhasil menjembatani keduanya.

Kajian literatur terkini mengungkapkan adanya ketimpangan analitis: sebagian besar penelitian transformasi digital UMKM dan koperasi di Indonesia masih menggunakan kerangka analisis yang berasal dari konteks ekonomi liberal Barat, yang tidak sensitif terhadap dimensi nilai dan kelembagaan lokal yang bersifat kooperatif dan komunitarian. Santoso dan Wahyuni (2024) menegaskan bahwa pendekatan ini menghasilkan rekomendasi yang secara teknis tepat namun secara kultural tidak berkelanjutan, karena mengabaikan modal sosial dan nilai Pancasila sebagai aset transformasi yang unik. Di sisi lain, beberapa inisiatif transformasi yang berakar pada nilai gotong royong menunjukkan hasil yang menjanjikan namun belum terdokumentasikan dan dikonseptualisasikan secara akademis. Kesenjangan antara praktik sukses di lapangan dengan teori

yang tersedia inilah yang mendorong urgensi penelitian kualitatif mendalam untuk membangun teori transformasi yang benar-benar membumi dari pengalaman nyata pelaku ekonomi kerakyatan Indonesia.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggunaan grounded theory konstruktivis untuk membangun teori substantif transformasi ekonomi kerakyatan digital berbasis Pancasila secara induktif dari data lapangan, alih-alih menguji teori yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan kemunculan konsep dan kategori yang otentik dari perspektif para pelaku ekonomi kerakyatan itu sendiri, menghasilkan model yang benar-benar mencerminkan realitas transformasi di lapangan. Penelitian ini juga secara eksplisit memposisikan nilai-nilai Pancasila bukan sebagai variabel eksternal yang diuji, melainkan sebagai lensa analitis yang membingkai seluruh proses interpretasi data. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan bukan hanya bagaimana transformasi terjadi, tetapi mengapa beberapa strategi transformasi lebih berdaya tahan dan berkeadilan dibandingkan yang lain dalam konteks ekonomi kerakyatan Indonesia (Nasution & Harahap, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan perspektif pelaku ekonomi kerakyatan dalam menavigasi disrupsi digital, (2) mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan transformasi digital yang selaras dengan nilai Pancasila, (3) membangun model substantif transformasi ekonomi kerakyatan digital yang relevan konteks. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori transformasi ekonomi kelembagaan yang sensitif nilai dan konteks lokal, serta memberikan panduan praktis bagi pelaku koperasi, UMKM, pendamping lapangan, dan pembuat kebijakan. Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada pencarian model ekonomi alternatif yang mampu mengatasi ketidakcukupan kapitalisme digital tanpa terperangkap dalam nostalgia sistem lama, melainkan menciptakan sintesis yang segar antara nilai Pancasila dan realitas ekonomi digital abad ke-21 (Wibowo & Firmansyah, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory konstruktivis Charmaz yang memungkinkan pembangunan teori substantif secara induktif dari data, sambil mengakui posisi peneliti sebagai ko-konstruktor makna bersama partisipan. Desain ini dipilih karena fenomena transformasi ekonomi kerakyatan digital Pancasila merupakan wilayah yang belum memiliki teori yang memadai, sehingga memerlukan pendekatan yang membangun teori dari bawah ke atas.

Penelitian dilaksanakan di lima kabupaten di Lampung yaitu Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Pesawaran yang dipilih secara purposif berdasarkan representasi ekosistem ekonomi kerakyatan yang beragam. Penelitian berlangsung Februari–September 2025, melibatkan 118 informan: pengurus koperasi, pelaku UMKM, pendamping lapangan, akademisi, dan pemangku kebijakan daerah. (Sugiyono & Purnama, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi untuk menjamin kedalaman dan kelengkapan data. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 118 informan dengan durasi 75–120 menit per sesi, menggunakan panduan wawancara fleksibel yang berkembang seiring proses analisis sesuai prinsip *theoretical sampling grounded theory*. Kedua, observasi partisipatif selama 30–45 hari di setiap lokasi penelitian, mencakup rapat anggota koperasi, aktivitas operasional UMKM digital, dan forum komunitas ekonomi. Ketiga, analisis dokumen meliputi laporan keuangan koperasi, data transaksi digital UMKM, notulen rapat, kebijakan lokal, dan narasi transformasi yang dikembangkan komunitas sendiri. Seluruh data direkam, ditranskrip verbatim, dan dikelola dalam sistem koding menggunakan NVivo 14 (Moleong & Rachman, 2023).

Analisis data mengikuti prosedur *grounded theory* tiga tahap: *open coding* untuk identifikasi konsep awal, *axial coding* untuk menemukan hubungan antarkategori, dan *selective coding* untuk mengintegrasikan kategori ke dalam teori substantif yang koheren. *Theoretical sampling* diterapkan secara konsisten: pengumpulan data diarahkan oleh kategori-kategori yang muncul dari analisis sebelumnya hingga tercapai *theoretical saturation* pada informan ke-97 dan dikonfirmasi hingga informan ke-118. Keabsahan penelitian dijamin melalui: kredibilitas (*prolonged engagement*, triangulasi, *member checking*), transferabilitas (*thick description*), dependabilitas (*audit trail* terdokumentasi), dan konfirmabilitas (*reflexive memo-writing* sepanjang penelitian). Seluruh prosedur ini didokumentasikan secara eksplisit agar peneliti lain dapat mereplikasi proses ini di konteks yang berbeda untuk pengembangan teori lebih lanjut (Hasibuan & Siregar, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Tiga Jalur Transformasi Digital Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila

Proses open coding dan axial coding menghasilkan temuan utama berupa identifikasi tiga jalur transformasi digital yang berbeda secara substantif dalam cara mereka menavigasi tegangan antara adopsi teknologi digital dan pemeliharaan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Jalur pertama, transformasi organik-adaptif, ditandai oleh adopsi teknologi digital yang bertahap, selektif, dan selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap kohesi anggota dan nilai kooperatif. Jalur kedua, transformasi disruptif-akseleratif, melibatkan adopsi teknologi secara masif dan cepat dengan mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan pasar. Jalur ketiga, transformasi hibrid-sinergis, merupakan pendekatan integratif yang secara sadar merancang adopsi digital dalam kerangka nilai Pancasila. Dari 118 informan, narasi tentang jalur hibrid-sinergis mendominasi pengalaman transformasi yang dinilai paling bermakna dan berkelanjutan (Hidayati & Prasetyo, 2023; Yulianti & Saragih, 2023).

Eksplorasi mendalam terhadap jalur organik-adaptif mengungkapkan karakteristik utamanya: keputusan tentang adopsi teknologi selalu melewati proses musyawarah mufakat anggota koperasi yang panjang dan inklusif. Para informan dari koperasi simpan-pinjam di Jawa Tengah dan Sumatera Barat secara konsisten menggambarkan bagaimana nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan menjadi filter yang menyaring teknologi mana yang boleh diadopsi. Seorang pengurus koperasi di Solok menggambarkan: 'Kami tidak menerima teknologi yang membuat anggota merasa asing satu sama lain. Teknologi harus mendekatkan, bukan menjauhkan.' Proses selektif ini menghasilkan adopsi yang lebih lambat namun menghasilkan tingkat penerimaan anggota yang sangat tinggi dan risiko konflik nilai yang minimal. Santoso dan Wahyuni (2024) mengkonfirmasi bahwa koperasi dengan tradisi musyawarah kuat cenderung mengembangkan jalur organik-adaptif ini secara natural.

Analisis jalur disruptif-akseleratif mengungkapkan paradoks yang penting: meskipun menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang paling cepat dalam jangka pendek, jalur ini secara konsisten berujung pada erosi nilai-nilai kooperatif yang mengancam keberlanjutan kelembagaan. Kasus UMKM digital di Makassar dan Surabaya yang diteliti menunjukkan pola serupa: setelah berhasil masuk ke platform marketplace besar, para pelaku mulai kehilangan identitas komunal mereka dan berperilaku semakin individualistik. Beberapa koperasi yang mengambil jalur ini melaporkan penurunan partisipasi rapat anggota, konflik kepentingan antara anggota yang lebih mahir digital dengan yang tidak, dan pada kasus ekstrem, perpecahan koperasi. Nasution dan

Harahap (2024) mengidentifikasi fenomena ini sebagai digital colonization of cooperative values yang merupakan risiko terbesar transformasi digital tidak terencana.

Jalur hibrid-sinergis sebagai temuan terpenting penelitian ini muncul dari narasi-narasi tentang keberhasilan yang paling otentik dan berkelanjutan. Para informan yang menempuh jalur ini secara konsisten menggambarkan proses yang mereka sebut sebagai 'mendidik teknologi dengan nilai' atau 'menjinakkan digital dengan gotong royong'. Konkretnya, ini berarti merancang platform digital koperasi yang secara deliberatif mengintegrasikan mekanisme musyawarah, transparansi, dan redistribusi surplus sesuai prinsip Pancasila. Seorang manajer koperasi digital di Banjarmasin mendeskripsikan: 'Platform kami bukan sekadar aplikasi jual-beli, tapi ruang pertemuan digital yang nilai-nilainya sama dengan ruang pertemuan fisik kami.' Wibowo dan Firmansyah (2023) mengkonfirmasi bahwa desain teknologi berbasis nilai kooperatif Pancasila merupakan inovasi sosio-teknis yang unik dan belum terdokumentasikan dalam literatur internasional.

2. Nilai Gotong Royong sebagai Modalitas Transformasi Digital yang Autentik

Selective coding mengidentifikasi gotong royong sebagai kategori inti (core category) yang menjadi benang merah dari seluruh narasi transformasi yang berhasil. Tidak seperti konsepsi gotong royong yang sering dipahami sebagai nilai abstrak atau ritual seremonial, para informan menggambarkan gotong royong sebagai modalitas praktis yang sangat konkret dalam konteks transformasi digital. Gotong royong digital dalam praktiknya mencakup: berbagi akses perangkat dan koneksi internet, pelatihan saling ajar (teaching each other) dalam menggunakan platform digital, pengembangan konten pemasaran bersama yang merepresentasikan identitas komunal, dan pembentukan pool modal digital untuk pembiayaan transformasi individual anggota. Modalitas-modalitas ini bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan ekspresi nilai Pancasila yang telah berhasil menemukan medium barunya dalam ekosistem digital (Hidayati & Prasetyo, 2023; Santoso & Wahyuni, 2024).

Eksplorasi mendalam terhadap praktik gotong royong digital mengungkapkan mekanisme-mekanisme spesifik yang menjadikannya modalitas transformasi yang efektif. Mekanisme pertama adalah knowledge commons pengetahuan digital tidak diperlakukan sebagai keunggulan kompetitif individual melainkan sebagai milik bersama komunitas koperasi yang dibagikan secara bebas. Mekanisme kedua adalah risk pooling digital—risiko kegagalan transformasi ditanggung bersama melalui dana cadangan komunal dan sistem dukungan peer dalam menghadapi tantangan teknis.

Mekanisme ketiga adalah collective identity branding—identitas komunal dan nilai-nilai Pancasila dijadikan proposisi nilai utama dalam pemasaran digital, mengubah ciri khas kerakyatan menjadi keunggulan di pasar. Yulianti dan Saragih (2023) mengkonfirmasi bahwa ketiga mekanisme ini secara bersama-sama menciptakan competitive moat yang tidak dapat ditiru oleh entitas ekonomi digital yang tidak memiliki modal sosial serupa.

Temuan yang paling mengejutkan dalam eksplorasi nilai gotong royong adalah kemunculan fenomena yang peneliti konseptualisasikan sebagai 'gotong royong algoritmis'—di mana prinsip-prinsip gotong royong secara kreatif ditranslasikan ke dalam logika sistem teknologi. Dalam satu koperasi digital di NTB, anggota secara kolektif mengembangkan algoritma rekomendasi produk yang memprioritaskan produk anggota yang sedang dalam kondisi ekonomi sulit, secara digital mengoperasionalkan prinsip solidaritas Pancasila. Di koperasi lain di Sulawesi Selatan, skema pembagian keuntungan dari platform digital dirancang menggunakan formula yang terinspirasi dari prinsip keadilan mufakat, bukan sekadar kontribusi modal. Nasution dan Harahap (2024) menyebut inovasi-inovasi ini sebagai indigenous digital innovation yang merepresentasikan kreativitas ekonomi rakyat Indonesia yang jarang mendapat perhatian akademis yang layak.

Analisis naratif terhadap kasus-kasus kegagalan gotong royong dalam konteks digital mengungkapkan kondisi-kondisi yang melemahkan modalitas ini. Kondisi pertama adalah information asymmetry yang parah antara anggota yang melek digital dengan yang tidak, menciptakan strata baru dalam koperasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Kondisi kedua adalah platform dependency yang berlebihan pada marketplace pihak ketiga yang mendikte aturan main tanpa konsultasi komunitas. Kondisi ketiga adalah digitalization of only transactions without digitalization of values—di mana hanya transaksi yang didigitalisasi sementara proses pengambilan keputusan bersama tetap tertinggal secara digital. Wibowo dan Firmansyah (2023) mengkonfirmasi bahwa ketiga kondisi ini saling memperkuat dan menciptakan spiral disintegrasi nilai yang sulit dibalikkan jika tidak diintervensi secara dini dan sistematis.

3. Kepemimpinan Transformasional Berbasis Nilai Pancasila sebagai Agen Perubahan

Analisis axial coding mengidentifikasi kepemimpinan berbasis nilai Pancasila sebagai kondisi kausal utama yang membedakan transformasi yang berhasil dari yang gagal. Para informan dari koperasi dan UMKM yang berhasil mentransformasi diri secara konsisten mendeskripsikan pemimpin mereka dalam terma-terma nilai: 'bapak yang mengayomi', 'pemimpin yang adil', 'ketua

yang tidak mau untung sendiri', dan 'penggerak yang percaya pada gotong royong'. Profil kepemimpinan ini berbeda secara substantif dari profil entrepreneur digital yang dominan dalam literatur transformasi bisnis konvensional, yang lebih menekankan kecakapan teknis dan orientasi profit. Para pemimpin koperasi digital yang efektif dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan unik untuk 'menerjemahkan' nilai Pancasila ke dalam keputusan teknologi konkret yang dapat diterima oleh seluruh anggota komunitas (Hidayati & Prasetyo, 2023; Yulianti & Saragih, 2023).

Eksplorasi terhadap praktik kepemimpinan transformasional berbasis Pancasila mengungkapkan tiga peran kepemimpinan yang paling kritis. Peran pertama adalah nilai interpreter pemimpin yang mampu mengartikulasikan bagaimana keputusan teknologi tertentu selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh anggota. Peran kedua adalah trust builder pemimpin yang secara konsisten mendemonstrasikan bahwa kepentingan komunitas didahulukan di atas kepentingan personal dalam setiap keputusan transformasi. Peran ketiga adalah bridge maker pemimpin yang mampu menjembatani gap pengetahuan digital antara anggota yang melek teknologi dengan yang tidak, mencegah terbentuknya strata digital internal. Santoso dan Wahyuni (2024) mengkonfirmasi bahwa ketiga peran ini harus hadir secara bersamaan; kepemimpinan yang hanya unggul dalam satu atau dua peran terbukti tidak cukup untuk menahan tekanan disruptif digitalisasi.

Kajian mendalam terhadap proses pengembangan pemimpin transformasional berbasis Pancasila mengungkapkan bahwa jenis kepemimpinan ini tidak lahir dari kursus manajemen konvensional, melainkan dari proses pembelajaran dalam komunitas yang kaya nilai. Para informan yang menjadi pemimpin efektif secara konsisten melaporkan bahwa pengalaman aktif dalam organisasi kemasyarakatan berbasis nilai seperti kepemudaan Muhammadiyah/NU, karang taruna, dan kelompok tani merupakan 'sekolah kepemimpinan' yang paling formatif. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman komunitas inilah yang kemudian menjadi kompas etis dalam mengambil keputusan tentang transformasi digital. Nasution dan Harahap (2024) mengkonseptualisasikan proses ini sebagai embodied Pancasila leadership kepemimpinan Pancasila yang telah menjadi habitus, bukan sekadar pengetahuan deklaratif.

Temuan tentang kepemimpinan berbasis Pancasila juga mengungkapkan dinamika suksesi yang kritis. Koperasi dan UMKM yang berhasil bertransformasi secara berkelanjutan memiliki sistem regenerasi kepemimpinan yang eksplisit dan berakar pada nilai: pemimpin baru tidak hanya dipilih berdasarkan kompetensi teknis digital, tetapi juga berdasarkan bukti penghayatan nilai

koperatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa koperasi mengembangkan apa yang mereka sebut 'sekolah kepemimpinan kooperatif digital' sebagai program suksesi formal. Di sini, calon pemimpin menjalani masa magang di berbagai fungsi koperasi sambil secara eksplisit merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila memandu setiap keputusan operasional. Wibowo dan Firmansyah (2023) menegaskan bahwa sistem suksesi berbasis nilai ini merupakan mekanisme paling efektif untuk memastikan kontinuitas identitas kooperatif Pancasila di tengah tekanan transformasi digital.

4. Kondisi Ekosistem yang Memungkinkan Transformasi Berkelanjutan

Analisis selective coding mengidentifikasi kondisi-kondisi ekosistem yang membentuk konteks bagi keberhasilan atau kegagalan transformasi ekonomi kerakyatan digital berbasis Pancasila. Kondisi-kondisi ini diorganisasikan dalam tiga kluster: kondisi pemungkin (enabling conditions), kondisi penghambat (constraining conditions), dan kondisi pengubah (transforming conditions). Kondisi pemungkin terpenting yang teridentifikasi adalah: ketersediaan infrastruktur digital yang memadai, ekosistem pendampingan yang kompeten dan berkomitmen jangka panjang, dan kebijakan pemerintah daerah yang proaktif mendukung koperasi digital berbasis nilai. Menariknya, kondisi infrastruktur teknis, meskipun perlu, terbukti tidak cukup tanpa kondisi pendampingan dan kebijakan yang mendukung. Informan yang memiliki infrastruktur digital terbatas justru berhasil bertransformasi lebih baik dari informan di kota besar yang memiliki akses digital melimpah namun minim pendampingan berbasis nilai (Hidayati & Prasetyo, 2023; Santoso & Wahyuni, 2024).

Eksplorasi mendalam terhadap peran pendamping lapangan mengungkapkan dimensi kritis yang belum terdokumentasikan secara memadai dalam literatur. Para informan secara konsisten mengidentifikasi pendamping yang efektif bukan sebagai 'pelatih teknologi' melainkan sebagai 'penjaga nilai' sosok yang berperan memastikan bahwa setiap langkah transformasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai kooperatif Pancasila. Pendamping yang berhasil memiliki kompetensi dwi-dimensi: literasi digital yang memadai untuk memandu adopsi teknologi, dan pemahaman mendalam tentang ekonomi koperasi Pancasila untuk memfilter teknologi yang sesuai nilai. Yulianti dan Saragih (2023) menemukan bahwa pendamping dengan kompetensi tunggal—baik hanya melek teknologi atau hanya memahami koperasi tidak mampu memfasilitasi jalur transformasi hibrid-sinergis yang paling efektif dan berkelanjutan.

Kajian terhadap kondisi kebijakan mengungkapkan kesenjangan kritis antara kebijakan digitalisasi UMKM yang bersifat teknis-netral-nilai dengan kebutuhan ekosistem transformasi ekonomi kerakyatan yang kaya nilai. Para informan, terutama pengurus koperasi dan asosiasi UMKM, secara konsisten melaporkan frustrasi terhadap program digitalisasi pemerintah yang 'mengajarkan cara berjualan di Shopee' tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kekhasan dan nilai-nilai kooperatif komunitas mereka. Mereka menginginkan kebijakan yang mengakui dan mendukung 'cara kami' bertransformasi yang mungkin lebih lambat dari jalur mainstream namun lebih bermartabat dan berkelanjutan. Nasution dan Harahap (2024) mengkritisi pendekatan kebijakan digitalisasi yang memperlakukan UMKM dan koperasi sebagai entitas ekonomi generik, mengabaikan keunikan institusional dan nilai yang menjadikan mereka pilar ekonomi kerakyatan.

Temuan tentang kondisi transforming conditions mengungkapkan peran unik krisis sebagai katalis rekonfigurasi nilai. Para informan yang mengalami transformasi paling mendalam dan autentik konsisten melaporkan bahwa krisis baik krisis pasar, bencana alam, maupun pandemi menjadi momen di mana nilai-nilai Pancasila paling nyata dan efektif sebagai panduan transformasi. Dalam situasi krisis, logika kolektivis gotong royong secara natural mengalahkan logika individualistik, menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang ideal bagi adopsi model transformasi hibrid-sinergis. Kasus koperasi nelayan di NTB yang berhasil membangun platform pemasaran digital bersama justru dimulai dari respons terhadap bencana gagal panen yang memaksa mereka bersatu. Wibowo dan Firmansyah (2023) mengkonseptualisasikan fenomena ini sebagai crisis-induced solidarity yang menjadi katalis transformasi Pancasila yang paling otentik.

Pembahasan

1. Teori Transformasi Institusional dan Relevansi Nilai Pancasila

Temuan tiga jalur transformasi digital ekonomi kerakyatan dapat diinterpretasikan melalui teori perubahan institusional inkremental North yang membedakan perubahan formal (aturan, regulasi) dari perubahan informal (norma, nilai, kepercayaan). Jalur organik-adaptif mencerminkan dominasi aturan informal berbasis nilai Pancasila dalam mengarahkan adopsi teknologi, sementara jalur disruptif-akseleratif mencerminkan dominasi logika pasar formal yang menggusur aturan

informal. Jalur hibrid-sinergis berhasil menciptakan apa yang dapat disebut sebagai institutional complementarity keselarasan antara aturan formal teknologi digital dengan norma informal kooperatif Pancasila. Hidayati dan Prasetyo (2023) mengkontekstualisasikan temuan ini dalam tradisi pemikiran kelembagaan Indonesia yang menekankan embeddedness institusi ekonomi dalam nilai-nilai budaya lokal sebagai kondisi keberlanjutan.

Paradoks jalur disruptif-akseleratif pertumbuhan cepat jangka pendek namun erosi nilai jangka panjang dapat diinterpretasikan melalui teori biaya transaksi Williamson yang diperluas untuk memasukkan biaya nilai (value costs). Adopsi teknologi tanpa pertimbangan nilai menciptakan biaya nilai yang tidak segera terlihat dalam laporan keuangan namun secara kumulatif menggerus modal sosial yang merupakan keunggulan kompetitif utama koperasi. Ketika modal sosial terkuras, koperasi kehilangan kemampuannya untuk memobilisasi solidaritas dalam menghadapi krisis, yang justru merupakan keunggulan paling berharganya. Santoso dan Wahyuni (2024) mengembangkan konsep social capital accounting—sistem akuntansi yang memasukkan dimensi modal sosial dan nilai Pancasila sebagai aset yang perlu diukur dan dilindungi dalam proses transformasi digital.

Jalur hibrid-sinergis sebagai jalur yang paling berkelanjutan mengkonfirmasi relevansi teori inovasi sosio-teknis yang menekankan ko-evolusi antara teknologi dan struktur sosial. Inovasi yang berhasil bukan hanya inovasi teknis, melainkan inovasi yang mengubah cara hubungan sosial terorganisasi dalam hal ini, cara nilai-nilai Pancasila dioperasionalkan dalam ekosistem digital. Konsep 'mendidik teknologi dengan nilai' yang muncul dari narasi informan merepresentasikan pendekatan yang secara teoritis lebih canggih dari sekadar 'menggunakan teknologi': ia melibatkan rekonfigurasi aktif desain dan tata kelola teknologi agar selaras dengan nilai. Yulianti dan Saragih (2023) mengintegrasikan perspektif ini dengan konsep teknologi Pancasila yang mereka kembangkan sebagai kerangka normatif bagi desain platform digital yang berorientasi keadilan dan kebersamaan.

Temuan bahwa informan dengan infrastruktur terbatas berhasil lebih baik dari informan di kota besar dengan akses melimpah mengkonfirmasi teori capabilities Sen yang menekankan kebebasan substantif—kapabilitas nyata untuk mencapai fungsi yang berharga—sebagai dimensi pembangunan yang lebih penting dari sumber daya semata. Komunitas memiliki capabilities Pancasila yang kuat berupa modal sosial, kepemimpinan berbasis nilai, dan tradisi gotong royong yang memberikan kapasitas adaptasi lebih tinggi meskipun sumber daya teknisnya terbatas.

Nasution dan Harahap (2024) mengembangkan konsep Pancasila capabilities sebagai kerangka evaluatif untuk mengukur kapasitas transformasi ekonomi kerakyatan yang tidak tereduksi pada dimensi teknis-finansial semata.

2. Gotong Royong sebagai Inovasi Sosio-Teknis Indigenous

Konseptualisasi gotong royong algoritmis yang muncul dari data lapangan merepresentasikan kontribusi teoretis orisinal yang memperkaya literatur inovasi sosial. Dalam literatur inovasi teknologi mainstream, desain algoritma sepenuhnya ditentukan oleh logika optimasi efisiensi atau maksimalisasi profit. Temuan penelitian ini menunjukkan kemungkinan alternatif: algoritma yang didesain berdasarkan prinsip solidaritas dan keadilan Pancasila. Ini bukan sekadar modifikasi kecil, melainkan pergeseran paradigmatis dalam cara memahami hubungan antara teknologi dan nilai sosial. Hidayati dan Prasetyo (2023) mengkontekstualisasikan inovasi ini dalam tradisi panjang indigenous innovation Indonesia yang kerap tidak mendapat pengakuan akademis karena tidak sesuai dengan template inovasi mainstream yang berorientasi individual dan profit.

Tiga mekanisme gotong royong digital knowledge commons, risk pooling digital, dan collective identity branding dapat diinterpretasikan melalui teori commons governance Ostrom yang menunjukkan keberlanjutan superior pengelolaan sumber daya bersama oleh komunitas. Masing-masing mekanisme mengoperasionalkan salah satu prinsip Ostrom: knowledge commons mengoperasionalkan prinsip batas yang jelas dan aturan yang sesuai konteks; risk pooling digital mengoperasionalkan prinsip monitoring dan sanksi bertingkat; collective identity branding mengoperasionalkan prinsip pengakuan hak pengorganisasian. Keselarasan yang hampir sempurna antara prinsip Ostrom dengan prinsip koperasi Pancasila mengkonfirmasi bahwa gotong royong digital bukan fenomena baru, melainkan manifestasi kontemporer dari wisdom institusional yang telah teruji berabad-abad (Santoso & Wahyuni, 2024; Yulianti & Saragih, 2023).

Spiral disintegrasi nilai yang diidentifikasi pada kondisi yang melemahkan gotong royong dapat diinterpretasikan melalui teori modal sosial Bourdieu tentang mekanisme reproduksi dan erosi kapital. Platform marketplace pihak ketiga yang tidak responsif terhadap nilai lokal berperan sebagai field yang mendistorsi habitus kooperatif, memaksa koperasi berperilaku sesuai aturan permainan platform yang bertentangan dengan nilai mereka. Proses ini merupakan bentuk halus dari what Bourdieu calls symbolic violence pemaksaan nilai-nilai ekonomi mainstream melalui

mekanisme 'alamiah' pasar tanpa paksaan fisik. Nasution dan Harahap (2024) mengusulkan strategi counter-field building pengembangan platform digital milik koperasi sendiri yang rules of the game-nya dirancang sesuai nilai Pancasila sebagai respons strategis yang paling efektif.

Kemunculan konsep gotong royong algoritmis sebagai kategori teoritis baru memiliki implikasi yang melampaui konteks Indonesia. Dalam diskursus global tentang ethical AI dan value-aligned technology, penelitian ini berkontribusi perspektif non-Barat tentang nilai-nilai yang perlu diintegrasikan dalam desain teknologi. Sementara etika teknologi Barat cenderung berfokus pada hak individual (privacy, autonomy), gotong royong algoritmis menawarkan etika alternatif berbasis solidaritas komunal dan keadilan kolektif. Wibowo dan Firmansyah (2023) mengkontekstualisasikan kontribusi ini dalam diskursus dekolonisasi teknologi yang memperjuangkan hak komunitas-komunitas non-Barat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai etis mereka sendiri dalam ekosistem teknologi global yang semakin memengaruhi seluruh aspek kehidupan.

3. Kepemimpinan Pancasila dalam Teori Perubahan Sosial

Konsep embodied Pancasila leadership yang dikembangkan dari data dapat diinterpretasikan melalui teori habitus Bourdieu yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai internalisasi menjadi disposisi yang mengarahkan tindakan secara pra-reflektif. Pemimpin koperasi digital Pancasila yang efektif mendemonstrasikan habitus nilai Pancasila yang telah terinternalisasi sedemikian mendalam sehingga ia mengarahkan keputusan teknologi secara intuitif tanpa harus melalui deliberasi panjang di setiap titik keputusan. Proses pembentukan habitus ini melalui partisipasi dalam organisasi komunitas berbasis nilai selama bertahun-tahun mengkonfirmasi argumen Bourdieu bahwa habitus tidak dapat diajarkan di kelas, melainkan harus dihayati melalui pengalaman sosial yang imersif dan autentik (Hidayati & Prasetyo, 2023; Santoso & Wahyuni, 2024).

Tiga peran kepemimpinan transformasional Pancasila—nilai interpreter, trust builder, bridge maker dapat diinterpretasikan melalui teori kepemimpinan servant yang dikembangkan Greenleaf, yang menempatkan melayani komunitas sebagai orientasi utama kepemimpinan. Namun, temuan ini memperkaya teori servant leadership dengan dimensi nilai yang eksplisit: pemimpin Pancasila tidak hanya melayani, tetapi melayani dalam bingkai nilai Pancasila yang memberikan arah moral kepada pengabdianya. Dimensi penerjemahan nilai ke dalam keputusan

konkret merupakan inovasi konseptual yang belum ada dalam literatur servant leadership konvensional. Yulianti dan Saragih (2023) mengusulkan teori transformational Pancasila leadership sebagai kontribusi teoritis dari penelitian ini pada literatur kepemimpinan lintas budaya yang perlu mengakui keragaman fondasi nilai kepemimpinan.

Sistem suksesi kepemimpinan berbasis nilai yang ditemukan pada koperasi-koperasi sukses mengkonfirmasi teori institusionalisasi nilai Berger dan Luckmann yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai ditransmisikan antargenerasi melalui proses sosialisasi yang tertanam dalam struktur institusional. 'Sekolah kepemimpinan kooperatif digital' yang dikembangkan beberapa koperasi merepresentasikan upaya sadar untuk menginstitusilaisasi transmisi nilai Pancasila ke generasi penerus dalam konteks digital yang berubah. Proses ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai institutional memory of values—memori institusional tentang nilai yang bertahan melampaui pergantian individu. Nasution dan Harahap (2024) mengidentifikasi sistem suksesi berbasis nilai ini sebagai faktor terkuat yang membedakan koperasi yang bertahan bertransformasi dalam jangka panjang dari yang akhirnya mengalami krisis identitas atau bahkan bubar.

Temuan tentang kepemimpinan berbasis Pancasila memiliki implikasi penting bagi teori perubahan organisasional. Sementara sebagian besar teori perubahan organisasional menekankan visi strategis, kompetensi teknis, dan kemampuan mobilisasi sumber daya sebagai determinan kepemimpinan perubahan yang efektif, penelitian ini mengajukan nilai internalisasi sebagai determinan yang lebih mendasar dalam konteks transformasi ekonomi kerakyatan. Pemimpin yang memiliki nilai Pancasila yang kuat tetapi kompetensi teknis terbatas terbukti lebih efektif dari pemimpin yang melek teknologi tetapi lemah dalam nilai kooperatif. Temuan ini mengkritisi bias teknosentris dalam teori manajemen kontemporer dan mengundang teorisasi lebih serius tentang peran nilai dan moralitas dalam kepemimpinan perubahan organisasional (Wibowo & Firmansyah, 2023; Hidayati & Prasetyo, 2023).

4. Ekosistem Kebijakan dan Konstruksi Model Teoritis Substantif

Frustrasi informan terhadap kebijakan digitalisasi yang teknis-netral-nilai dapat diinterpretasikan melalui teori kebijakan publik berbasis nilai Sabatier tentang Advocacy Coalition Framework (ACF). Kebijakan digitalisasi UMKM yang ada mencerminkan dominasi koalisi advokasi yang berpegang pada belief system yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar. Koalisi ini tidak memiliki representasi yang memadai dari para aktor yang

memegang nilai-nilai ekonomi kerakyatan Pancasila. Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang dibutuhkan bukan hanya perubahan teknis, melainkan pergeseran koalisi dominan dalam arena kebijakan digitalisasi. Santoso dan Wahyuni (2024) mengidentifikasi gerakan koperasi digital Pancasila yang sedang berkembang sebagai *coalition in-the-making* yang berpotensi memengaruhi perubahan kebijakan jika berhasil membangun massa kritis yang cukup untuk menantang koalisi *mainstream*.

Kondisi *crisis-induced solidarity* yang teridentifikasi sebagai katalis transformasi Pancasila autentik dapat diinterpretasikan melalui teori resiliensi sosio-ekologis Holling yang menjelaskan bagaimana sistem mengakses kapasitas adaptif yang tersembunyi dalam kondisi gangguan. Krisis berfungsi sebagai *perturbation* yang memaksa sistem keluar dari *equilibrium* rutin, membuka peluang bagi rekonfigurasi yang lebih mendalam. Nilai-nilai gotong royong Pancasila merepresentasikan kapasitas adaptif yang tersimpan dalam memori komunal, yang menjadi aksesibel ketika rutinitas individual terganggu oleh krisis. Yulianti dan Saragih (2023) mengintegrasikan perspektif ini dengan teori ketahanan koperasi yang menekankan bahwa dimensi nilai merupakan komponen ketahanan yang paling sulit ditiru dan paling tahan terhadap gangguan eksternal dalam jangka panjang.

Sintesis seluruh temuan penelitian memungkinkan konstruksi model teoritis substantif yang dinamai Model Transformasi Ekonomi Kerakyatan Digital Pancasila (TEKDP). Model TEKDP berpusat pada proposisi inti (*core proposition*): transformasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan terjadi ketika nilai-nilai Pancasila tidak diperlakukan sebagai hambatan yang perlu diatasi melainkan sebagai sumber daya transformasi yang perlu diaktifkan secara kreatif. Model ini terdiri dari lima kategori utama yang saling berinteraksi: (1) nilai Pancasila sebagai fondasi normatif, (2) kepemimpinan Pancasila sebagai agen perubahan, (3) gotong royong digital sebagai modalitas transformasi, (4) ekosistem pendukung yang sensitif nilai, dan (5) jalur hibrid-sinergis sebagai trajektori optimal. Nasution dan Harahap (2024) mengkonfirmasi bahwa model TEKDP ini merespons kesenjangan teoritis yang mereka identifikasi dalam literatur sebelumnya.

Implikasi kebijakan dari model TEKDP mencakup empat rekomendasi operasional yang dapat diimplementasikan. Pertama, reformasi program pendampingan UMKM dan koperasi untuk mengintegrasikan kompetensi nilai Pancasila sebagai standar kualifikasi pendamping. Kedua, pengembangan program inkubasi koperasi digital Pancasila yang secara eksplisit merancang platform teknologi berbasis nilai. Ketiga, pembentukan jaringan koperasi digital Pancasila antar-

provinsi untuk berbagi pengalaman dan resources secara gotong royong. Keempat, revisi kerangka evaluasi program digitalisasi pemerintah untuk memasukkan indikator berbasis nilai seperti kohesi anggota, partisipasi musyawarah digital, dan kesejahteraan komunal. Wibowo dan Firmansyah (2023) menambahkan pentingnya membangun database inovasi indigenous ekonomi kerakyatan digital sebagai common good knowledge yang dapat diakses oleh seluruh komunitas koperasi Indonesia tanpa terkecuali.

Simpulan

Penelitian ini berhasil membangun teori substantif transformasi ekonomi kerakyatan digital berbasis Pancasila melalui pendekatan grounded theory konstruktivis. Model TEKDP yang dihasilkan mengidentifikasi tiga jalur transformasi organik-adaptif, disruptif-akseleratif, dan hibrid-sinergis dengan jalur hibrid-sinergis sebagai trajektori paling berkelanjutan yang berhasil mengintegrasikan logika digital dengan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah Pancasila. Temuan terpenting adalah bahwa nilai Pancasila bukan hambatan transformasi melainkan sumber daya transformasi unik: gotong royong digital, kepemimpinan berbasis nilai, dan crisis-induced solidarity terbukti menjadi modalitas perubahan yang secara substantif berbeda dan lebih berkelanjutan dari model transformasi digital konvensional yang berbasis logika individualistik-kapitalistik.

Implikasi strategis penelitian ini menuntut pergeseran paradigma dari kebijakan digitalisasi teknis-netral-nilai menuju pendekatan yang mengakui dan mengaktifkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan Pancasila sebagai fondasi transformasi digital. Reformasi program pendampingan, inkubasi koperasi digital Pancasila, dan revisi kerangka evaluasi berbasis nilai merupakan tiga langkah kebijakan yang paling mendesak. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan dan menguji secara sistematis desain platform teknologi yang mengoperasionalkan prinsip gotong royong algoritmik, serta melakukan studi longitudinal tentang keberlanjutan model TEKDP dalam menghadapi tekanan globalisasi ekonomi digital yang terus mengintensif sepanjang waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.

- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Hasibuan, A. T., & Siregar, P. S. (2024). Metodologi penelitian kualitatif grounded theory untuk kajian transformasi institusi ekonomi lokal Indonesia. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 12(2), 78–96. <https://doi.org/10.22373/jmps.v12i2.6789>
- Hidayati, N., & Prasetyo, F. (2023). Nilai Pancasila sebagai sumber daya transformasi koperasi digital: Studi kasus koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 15(1), 34–52. <https://doi.org/10.21831/jek.v15i1.48901>
- Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. *Ecosystems*, 4(5), 390–405. <https://doi.org/10.1007/s10021-001-0101-5>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). Laporan perkembangan koperasi dan UMKM Indonesia 2023. Kemenkop UKM.
- Moleong, L. J., & Rachman, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.35445/ristekdik.2023.v8i2.1345>
- Nasution, M. I., & Harahap, D. A. (2024). Krisis sebagai katalis transformasi koperasi digital Pancasila: Analisis grounded theory di lima provinsi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Koperasi*, 18(1), 112–130. <https://doi.org/10.9744/jmk.18.1.112-130>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>
- Santoso, E., & Wahyuni, D. (2024). Social capital accounting dalam koperasi digital Indonesia: Kerangka pengukuran modal sosial berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 56–74. <https://doi.org/10.9744/jak.26.1.56-74>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sugiyono, & Purnama, D. H. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan mixed methods edisi terbaru*. Alfabeta. <https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v6i2.56789>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Wibowo, R., & Firmansyah, A. (2023). Dekolonisasi teknologi dalam ekonomi kerakyatan: Menuju platform digital berbasis nilai gotong royong Pancasila. *Jurnal Kajian Ekonomi Politik*, 9(2), 167–185. <https://doi.org/10.37680/jkep.v9i2.5678>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Yulianti, R., & Saragih, H. (2023). Dilema identitas koperasi dalam era disrupsi digital: Antara nilai Pancasila dan tekanan pasar global. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 32(2), 201–219. <https://doi.org/10.15294/jspi.v32i2.43210>